



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN


GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO I LANTAI 2 JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NOMOR 2-4 JAKARTA  
TELEPON (021) 3449230 EXT. 5203, 5204 FAKSIMILE (021) 3846402  
WEBSITE: [www.perbendaharaan.go.id](http://www.perbendaharaan.go.id)

Nomor : S-8878 /PB/2017 10 Oktober 2017  
Sifat : Sangat Segera  
Lampiran : 3 (tiga) lembar  
Hal : Ketentuan Lebih Lanjut dalam Penyusunan LKKL Triwulan III Komprehensif Tahun 2017

Yth. Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Kepala/Wakil  
Kepala/Direktur Umum Kementerian Negara/Lembaga (terlampir)  
Jakarta

Menyusuli Surat kami Nomor S-8533/PB/2017 hal Penyusunan LKKL Triwulan III Komprehensif Tahun 2017 dan dalam rangka meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) Tahun 2017, dengan ini kami sampaikan ketentuan lebih lanjut dalam penyusunan LKKL Triwulan III Komprehensif Tahun 2017, sebagai berikut:

1. Rekonsiliasi eksternal antara Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)/Satuan Kerja dengan KPPN dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Tanggal 6 s.d. 16 Oktober 2017 *open period upload* ADK ke Aplikasi e-Rekon&LK;
  - b. Tanggal 17 s.d. 18 Oktober 2017 *closed period upload* ADK ke Aplikasi e-Rekon&LK;
  - c. Tanggal 6 s.d. 17 Oktober 2017 merupakan masa penyelesaian rekonsiliasi;
  - d. Apabila sampai dengan tanggal 17 Oktober 2017, Satker belum menyelesaikan rekonsiliasi (status rekonsiliasi pada aplikasi e-Rekon&LK belum memperoleh status "menunggu TTD KPA"), satker akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 104/PMK.05/2017;
  - e. Tanggal 19 s.d. 30 Oktober 2017 *open period upload* ADK ke Aplikasi e-Rekon&LK untuk:
    - 1) *Upload* awal/ulang untuk menyelesaikan sanksi rekonsiliasi; dan
    - 2) perbaikan laporan keuangan;
2. Dalam rangka menyelesaikan permasalahan adanya selisih nilai yang signifikan antara transfer masuk dan transfer keluar Barang Milik Negara yang tidak dapat ditelusuri pada LKKL Semester I Tahun 2017, satker agar menggunakan Aplikasi Persediaan versi 17.1 dan SIMAK versi 17.1;
3. Selain itu, pada Aplikasi e-Rekon&LK telah ditambahkan menu Monitoring Transfer Masuk/Keluar dalam rangka monitoring transaksi transfer masuk dan transfer keluar.
4. Sehubungan hal-hal di atas, maka:
  - a. Satker agar mengambil langkah-langkah percepatan guna menyelesaikan rekonsiliasi sebelum tanggal 17 Oktober 2017 agar tidak dikenakan sanksi;
  - b. Satker agar melakukan *update* Aplikasi versi terakhir sesuai surat petunjuk rilis sebagai berikut:
    - 1) Aplikasi Persediaan versi 17.1
    - 2) Aplikasi SIMAK-BMN versi 17.1
    - 3) Aplikasi SAIBA versi 4.3

- c. Dalam hal satker telah memperoleh BAR sebelum *update* aplikasi versi terakhir sebagaimana angka 4.b, maka satker agar melakukan *upload/upload* ulang ke e-Rekon&LK menggunakan aplikasi versi terakhir dimaksud pada masa *open period* s.d. tanggal 16 Oktober 2017 atau masa *open period* tanggal 19 s.d. 30 Oktober 2017 dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan Reset BAR ke KPPN atau dapat meminta melalui menu Beranda, klik tombol *refresh*  dikolom aksi pada Aplikasi e-Rekon&LK dengan menggunakan *user* KPA;
- d. Dalam hal satker belum memperoleh BAR dan belum mengupdate aplikasi dengan versi terakhir sebagaimana dimaksud, maka satker agar melakukan *update* aplikasi sebelum melakukan *upload* ke aplikasi e-rekon&LK;
- e. Satker/UAPPA-W/UAPPA-E1/UAPA agar melakukan monitoring Transfer masuk/Keluar pada Aplikasi e-Rekon&LK. Dalam hal masih terdapat selisih pada transaksi transfer masuk atau transfer keluar, satker agar melakukan penelusuran dan perbaikan data serta *upload* ulang ke Aplikasi e-rekon&LK.

Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.



a.n. Direktur Jenderal

Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan,

Firmansyah N. Nazaroedin  
NIP. 19640519 198402 1 001

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan;
2. Direktur Jenderal Kekayaan Negara;
3. Inspektur Jenderal/Inspektur seluruh Kementerian Negara/Lembaga
4. Para Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan seluruh Indonesia;
5. Para Kepala Kanwil Ditjen Kekayaan Negara seluruh Indonesia;
6. Para Kepala KPPN seluruh Indonesia;
7. Para Kepala KPKNL seluruh Indonesia.



**DAFTAR SEKRETARIS JENDERAL/SEKRETARIS UTAMA/SEKRETARIS/KEPALA/WAKIL  
 KEPALA/DIREKTUR UMUM/DEPUTI KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA**

No.	Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Kepala/Wakil Kepala/Direktur/Deputi Kementerian Negara/Lembaga
1.	Sekretaris Jenderal MPR RI
2.	Sekretaris Jenderal DPR RI
3.	Sekretaris Jenderal BPK RI
4.	Sekretaris Mahkamah Agung RI
5.	Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan Kejaksaan Agung RI
6.	Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara RI
7.	Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI
8.	Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri RI
9.	Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan RI
10.	Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
11.	Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan RI
12.	Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian RI
13.	Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian RI
14.	Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI
15.	Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan RI
16.	Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI
17.	Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI
18.	Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI
19.	Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan RI
20.	Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial RI
21.	Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
22.	Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan RI
23.	Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI
24.	Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan RI
25.	Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI
26.	Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI
27.	Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
28.	Sekretaris Jenderal Kementerian Pariwisata RI
29.	Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara RI
30.	Sekretaris Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI
31.	Sekretaris Kementerian Koperasi dan Unit Kecil dan Menengah RI
32.	Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI
33.	Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI

1



No.	Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Kepala/Wakil Kepala/Direktur/Deputi Kementerian Negara/Lembaga
34.	Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara
35.	Sekretaris Utama Lembaga Sandi Negara
36.	Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional
37.	Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik
38.	Sekretaris Utama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
39.	Sekretaris Utama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
40.	Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional
41.	Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika RI
42.	Wakil Kepala Kepolisian Negara RI
43.	Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan
44.	Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional
45.	Sekretaris Utama Badan Koordinasi Penanaman Modal
46.	Sekretaris Utama Badan Narkotika Nasional
47.	Sekretaris Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI
48.	Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
49.	Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
50.	Sekretaris Utama Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika
51.	Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum
52.	Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
53.	Sekretaris Utama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
54.	Sekretaris Utama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
55.	Sekretaris Utama Badan Tenaga Nuklir Nasional
56.	Sekretaris Utama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
57.	Sekretaris Utama Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
58.	Sekretaris Utama Badan Informasi Geospasial
59.	Sekretaris Utama Badan Standardisasi Nasional
60.	Sekretaris Utama Badan Pengawas Tenaga Nuklir
61.	Sekretaris Utama Lembaga Administrasi Negara
62.	Sekretaris Utama Arsip Nasional RI
63.	Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara
64.	Sekretaris Utama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
65.	Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan RI
66.	Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga RI
67.	Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi
68.	Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah RI
69.	Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial RI
70.	Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana
71.	Sekretaris Utama Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
72.	Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

No.	Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Kepala/Wakil Kepala/Direktur/Deputi Kementerian Negara/Lembaga
73.	Sekretaris Utama Badan SAR Nasional
74.	Sekretaris Jenderal Komisi Pengawas Persaingan Usaha
75.	Sekretaris Badan Pelaksana Badan Pengembangan Wilayah Suramadu
76.	Sekretaris Jenderal Ombudsman RI
77.	Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan
78.	Anggota I Deputi Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
79.	Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
80.	Deputi Administrasi Sekretaris Kabinet
81.	Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilu
82.	Direktur SDM dan Umum Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
83.	Direktur Umum Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia
84.	Wakil Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang
85.	Sekretaris Utama Badan Keamanan Laut
86.	Sekretaris Utama Badan Ekonomi Kreatif

f